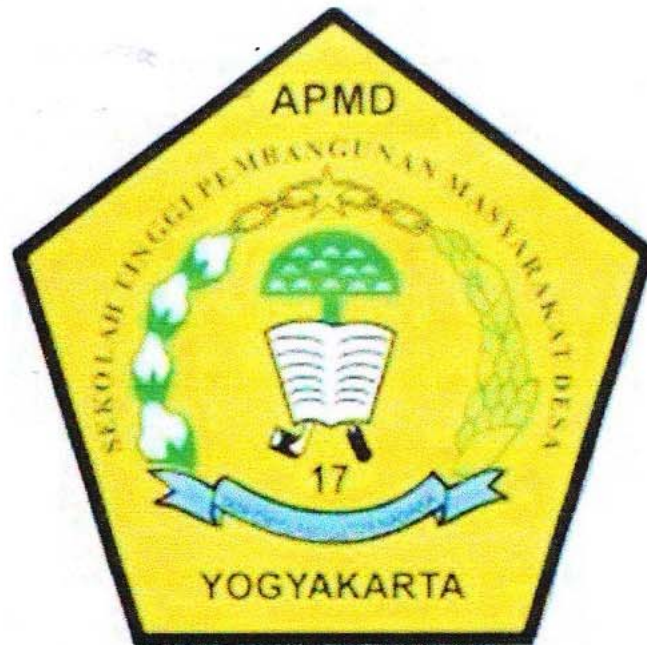


SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

*(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*



Disusun Oleh :

MA'ANI AHMAD

12520069

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

“APMD”

YOGYAKARTA



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, September 2016

Yang menyatakan



MA'ANI AHMAD

12520069

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di Depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 23 September 2016
Jam : 09.00
Tempat : Ruang Sidang Skripsi

TIM PENGUJI

Nama :

Tanda Tangan

1. Dra. Safitri Endah Winarti, M.SI
Ketua Penguji/Pembimbing

2. Drs. Parwoto, M.Si
Penguji Samping I

3. Ir. Muhammad Barori, M.SI
Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
"APMD"

YOGYAKARTA
2016

MOTTO

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

(Q.S. An-najm ayat 39-40)

“Sesuatu akan menjadi kebanggan

Jika sesuatu itu akan dikerjakan,

Dan bukan hanya dipikirkan.

Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan,

Jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya.

Bukan hanya menjadi impian”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.

Setiap detik waktu menyelesaikan skripsi ini merupakan hasil getaran doa kedua orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.

Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabat ku tercinta.

Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan hempsan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah SWT, Rabb semesta alam karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini penulis masih diberikan nikmat iman dan Islam. Sungguh pertolongan dan kasih sayang-Nya sungguh besar sehingga dapat tersusun skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes” Di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul**. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'at serta umat beliau yang senantiasa istiqomah untuk menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah dibantu oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada;

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si. selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. selaku ketua program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Drs. Parwoto, M.Si. selaku Dosen Penguji I
5. Bapak Ir. Muhammad Barori, M.Si. selaku Dosen Penguji II
6. Kepala Desa Kemiri beserta perangkat-perangkat desa lainnya yang telah sudi dan berkenan dengan bijaksana memberikan ijin serta bantuannya selama penulis melakukan penelitian dalam rangka pembuatan Skripsi ini.

7. Bapak Dukuh Mardiyanto dan Ibu Dukuh Tuminah beserta adik ipul yang telah membantu penulis selama penelitian.
8. Para informan yang telah dengan ramah dan terbuka dalam memberikan informasi dan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan data penelitian di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.
9. Semua Dosen Progm Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

Ucapan terimah kasih juga disampaikan kepada orang-orang terdekat penulis yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material selama kuliah di STPMD “APMD” terutama untuk ;

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Jainab Burhan dan Bapak Ahmad Gulam atas kasih sayang, doa’a. Bimbingan serta dukungan yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Adik-adik ku tersayang. Zaitun, Abu Jaid, Mukammil terimah kasih atas doa’a dan dukungannya.
3. Seluruh keluarga besarku, yang telah memberikan doa’a dan dukungannya.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2012, Noni, Adil, Ayu, Rio, Ifan, Samson, Bowo, Bambang, Fritz, Steven, Zulkifli, Elfin, Tina, seri, Imam Sutrisno, ka Nisa dan ka Dede. Terimah kasih atas persahabatan yang tak pernah terlupakan, dukungan serta semangat yang tiada henti kepada penulis.
5. Untuk sahabatku, Noni Natalia, Terimah kasik untuk semangat dan dukungannya, kamu salah satu dari sahabat terbaikku.
6. Teman KKN, Seri, Fritz, Bambang, Dede, Bowo, Noni terimah kasih atas kebersamaan kita selama ini.

7. Teman-teman seorganisasi AMALY (Angkatan Muda Solor Yogyakarta) & Rumah Lama terimah kasih atas doa dan dukungannya.
8. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kelancaran penyusunan tugas penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, September 2016

Penyusun

MA'ANI AHMAD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
SINOPSIS	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
E.1 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	9
E.2 Syarat-syarat yang Diperlukan Dalam Menyusun APBDes.....	17
E.3 Penyusunan RKPDesa	21
E.4.Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).....	24
E.5 Partisipasi Masyarakat	29
E.6 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDesa	32
F. Ruang Lingkup	34
G. Metode Penelitian	35

1. Jenis Penelitian	35
2. Unit Analisis	35
3. Teknik Pengumpulan Data	36
4. Teknik Analisis Data	38

BAB II PROFIL DESA KEMIRI

A. Data Geografis Desa	40
1. Letak Desa Penelitian	40
2. Luas Wilayah	40
B. Demografis	42
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	42
2. Penduduk Menurut Agama	43
3. Penduduk Mata Pencaharian	43
4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	43
C. Sarana Prasara	45
1. Sarana Peribadatan	45
2. Prasarana Olahraga	46
3. Sarana dan Prasarana Kesehatan	46
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan	47
5. Sarana Perekonomian	48
D. Kelembagaan	49
D.1. Lembaga Pemerintah Desa	49
D.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kemiri	58
D.3. Lembaga Kemasyarakatan Desa	60

**BAB III ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA**

A. Deskripsi Informan	68
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Nama dan Jabatan	68
2. Deskripsi Informan Berdasarkan Umur	69
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	70
4. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan	71
5. Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	72
B. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBDes	73
1. Voice Masyarakat dalam Penyusunan APBDesa	74
2. Akses Masyarakat Dalam Penyusunan APBDesa	79
3. Kontrol Masyarakat Dalam Penyusunan APBDesa	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

Daftar Tabel

Tabel II.1	Luas Desa Kemiri Berdasarkan Fungsinya	41
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	42
Tabel II.3	klasifikasi Penduduk Menurut Agama	43
Tabel II.4	Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok	44
Table II.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel II.6	Jumlah Prasarana Olahraga	46
Tabel II.7	Prasarana dan Kesehatan Sarana	47
Tabel II.8.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	48
Tabel II.9	Sarana Perekonomian di Desa Kemiri	48
Tabel III.1	Deskripsi Informan Berdasarkan Jabatan	69
Tabel III.2	Deskripsi Informan Berdasarkan Umur	70
Tabel III.3	Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	71
Tabel III.4	Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan	72
Tabel III.5	Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	73
Tabel III.6	Program Untuk Kepentingan Masyarakat Desa Kemiri	77
Tabel III.7	Sumber Pendapatan Desa	79

Daftar Gambar

Gambar I.1. Alur Penyusunan APBDesa Partisipatif	19
Gambar II.1. Bagan Struktur Pemerintah Desa Kemiri	58
Gambar II.2. Bagan Struktur Organisasi BPD Kemiri	60
Gambar II.3. Bagan Struktur Organisasi LPMD Kemiri	62
Gambar II.4. Bagan Struktur Organisasi TP PKK Desa Kemiri	65
Gambar II.5. Bagan Struktur Organisasi Karang Taruna Desa Kemiri	67

Daftar Pustaka

Interview Guide

Lampiran-lampiran

SINOPSIS

Judul dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berlokasi di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tersebut karena dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih mengutamakan pelaksanaan otonomi desa. Maka penyusunan APBDesa menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, menurut penulis penyusunan APBDesa di Desa Kemiri tidak ditempuh dengan partisipatif, sebagian masyarakat tidak aktif dalam musyawarah penyusunan APBDesa. Sebagian besar masyarakat juga tidak memahami rencana dan kebijakan anggaran. Penyusunan APBDesa yang dimaksud di atas hanya berfokus pada perencanaan saja dan tidak masuk dalam lingkup pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBDesa. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kemiri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 6 orang perangkat desa, 2 orang BPD, 2 orang Karang Taruna, 2 orang Kader PMD, 2 orang Kelompok Tani. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan langkah-langkah meliputi : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini 1) *voice* masyarakat Desa Kemiri dalam penyusunan APBDesa dilakukan dengan cara ikut terlibat dalam menentukan kebijakan anggaran untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Hal itu terlihat dari adanya program-program untuk kepentingan masyarakat Desa Kemiri dalam APBDesa tahun 2015, serta adanya pelayanan administrasi gratis bagi masyarakat. 2) akses masyarakat Desa Kemiri dilakukan dengan cara keterlibatan semua pihak dalam penyusunan APBDesa. Hal itu terlihat dari adanya keterlibatan dari unsur BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK dan unsur kelompok tani. Sehingga masyarakat yang mempunyai akses tersebut mengetahui sumber-sumber pendapatan desa dan memahami hal-hal yang di bahas dalam APBDesa. 3) kontrol masyarakat Desa Kemiri dilakukan dengan cara memastikan penyusunan APBDesa itu dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Hal tersebut juga terlihat dari adanya transparansi Pemerintah Desa Kemiri dalam penyusunan APBDesa dilakukan dengan cara mempublikasikan dan menginformasikan penyusunan APBDesa kepada masyarakat desa.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, APBDesa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana sebesar Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang pada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. (Pasal 37 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran

pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Di dalam proses pengelolaan APBDesa harus menekankan pada prinsip *Good Governance*, baik dari proses perencanaan, sampai pada proses pembuatannya, sehingga APBDesa tidak terjebak dalam fenomena proseduralisme atau formalisme yang menyebabkan APBDesa berlangsung secara tidak bermakna, karena tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat dan rencana berbasis desa, melainkan hanya sebagai prosedur yang harus dilewati.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan di Desa semakin banyak dan kompleks maka urusan pemerintahan dan pembangunan memerlukan disiplin dan efektivitas dari pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, khususnya yang dapat melayani bagian-bagian yang lebih khusus, yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Salah satu faktor penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan suatu desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disebut APBDesa) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dalam peraturan Desa. Karena APBDesa sangat penting dalam menjalankan pembangunan, maka penyusunannya harus melalui proses-proses atau tahap-tahap yang teratur dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan APBDesa harus dilakukan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Pasal 2 Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penyusunan APBDesa sangat penting dilakukan untuk mencerminkan perencanaan strategis desa yang disesuaikan berdasarkan visi, misi dan program desa yang telah dirancang secara partisipatif. Penyusunan APBDesa juga penting dilakukan untuk menjadi indikator kemampuan ekonomi desa dalam berotonomi. Dengan penyusunan APBDesa dapat mengungkapkan sumber-sumber pendapatan desa yang belum digali. Selain itu, dengan

penyusunan APBDesa dapat menghapuskan paradigma lama yang selalu dipertahankan oleh pemerintah desa. Di sini pemerintah desa mengesampingkan aspirasi masyarakat bahkan BPD, seolah-olah mencari dan mengalokasikan anggaran adalah hak dan bakatnya pemerintah desa. Akibatnya, APBDesa tidak disusun secara partisipatif dan alokasi anggaran juga bias antara kepentingan pemerintah desa dengan kepentingan masyarakat.

Pentingnya partisipasi dalam penyusunan APBDesa adalah 1) untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian dikalangan masyarakat desa untuk ikut terlibat dalam perencanaan anggaran. 2) agar kebijakan anggaran selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. 3) untuk mengurangi dominasi pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran. 4) agar kepentingan pemerintah desa dalam pembangunan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dan 5) agar kelompok-kelompok rentan atau kelompok minoritas di desa, seperti kelompok perempuan dan masyarakat difabel dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah desa.

Kajian penelitian ini diarahkan pada partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perencanaan pembangunan desa yang baik dilakukan oleh masyarakat desa sendiri, karena masyarakat yang tahu masalah yang dihadapinya, potensi yang ada di wilayahnya dan mereka yang tahu masalah yang dihadapinya, potensi yang ada di wilayahnya dan mereka yang tahu yang harus dilakukannya. Paling tidak perencanaan pembangunan desa termuat dalam dokumen yang disusun secara partisipatif dalam Rencana

Jangka Panjang Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatakan proses penyusunan APBDesa tidak bisa terlepas dari RKPDesa, kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan partisipasi masyarakat dengan semangat gotong royong. RKPDesa dan APBDesa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil pengamatan dan penelitian awal menunjukkan bahwa penyusunan APBDesa sebagian sudah berjalan sesuai dengan harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala yang ditemui di lapangan. Dalam pelaksanaannya faktor teknis seperti kekurangan personil staf desa menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Adanya masa transisi dari perubahan dasar hukum dan petunjuk yang digunakan, dari sebelumnya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sekarang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya perubahan nomenklatur dan jenis-jenis dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, seperti pengelompokan pendapatan dan belanja desa yang lebih terinci dari petunjuk sebelumnya. Perubahan-perubahan itu berdampak pada kesiapan aparat dan masyarakat desa dalam menyusun APBDesa.

Selain itu, masalah yang terjadi di Desa Kemiri adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDesa. Sebagian besar masyarakat Desa Kemiri tidak memahami rencana dan kebijakan anggaran dalam APBDesa. Masyarakat tidak aktif dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan di tingkat padukuhan maupun di desa. Masyarakat Desa Kemiri pada umumnya hanya mewakilkan dirinya kepada tokoh-tokoh masyarakat desa untuk menghadiri musyawarah dan pertemuan tentang pembahasan APBDesa.

Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan desa melalui penyusunan APBDesa, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan program pembangunan secara maksimal. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain perhatian diharapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil, hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh mereka.

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat padukuhan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam forum kecil di Padukuhan bahkan di tingkat RW/RT, masyarakat lebih berpeluang untuk terlibat dalam mengeluarkan pendapat dan

lebih dominan dalam berpartisipasi membahas dan menentukan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah itu sendiri. Selanjutnya, hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Padukuhan menjadi acuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti mengambil rumusan masalahnya adalah: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kemiri

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat Desa Kemiri.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan tim perumus, pemerintah desa dan lembaga desa yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan desa lewat APBDesa.

Daftar Pustaka

Buku :

- Dr. Lexy J. Moleong, M.A. 1993. **Metode Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosdakarya-Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. **Metode Penelitian Suatu Tindakan Praktek**. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Dr. Akhmad Sukardi, MM. 2019. **Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**. LaksBang PRESSindo Yogyakarta.
- Ach. Wazir Ws., et al. 1977, “**Pengertian dan Prinsip Partisipasi Masyarakat**” penerbit Erlangga.
- Eko Sutoro. 2004. “**Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, APMD Press Yogyakarta**”
- Dina Mariana,dkk. 2014, **Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa**. Yogyakarta.
- Handono, Eddi B. dkk, 2004, **Kumpulan Modul APBDes Partisipatif “Membangun Tanggung-gugat Tata Pemerintahan Desa”, FPPD, Jakarta.**
- Surianingrat, Bayu, 1985. **Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan**, Aksara Baru, Jakarta.
- V. Wiratna Sujuarweni, 2015. **Akuntansi Sektor Publik**. Jl. Wonosari Km 6, RT 04, Demblaksari, Baturetno, Yogyakarta.
- Safi’i H.M., 2008. **Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah**, Averroes Press, Mojolangu-Malang.

Sumber lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<http://waryono427.blogspot.co.uk/2015/03/panduan-penyusunan-apbdes-berdasarkan.html>

[\(www.artikelsiana.com/2015/06\)](http://www.artikelsiana.com/2015/06/)

<http://ismailnurdin.ipdn.ac.id/?p=88>

<https://kakilimasubang.wordpress.com/2008/07/09/definisi-proses/>